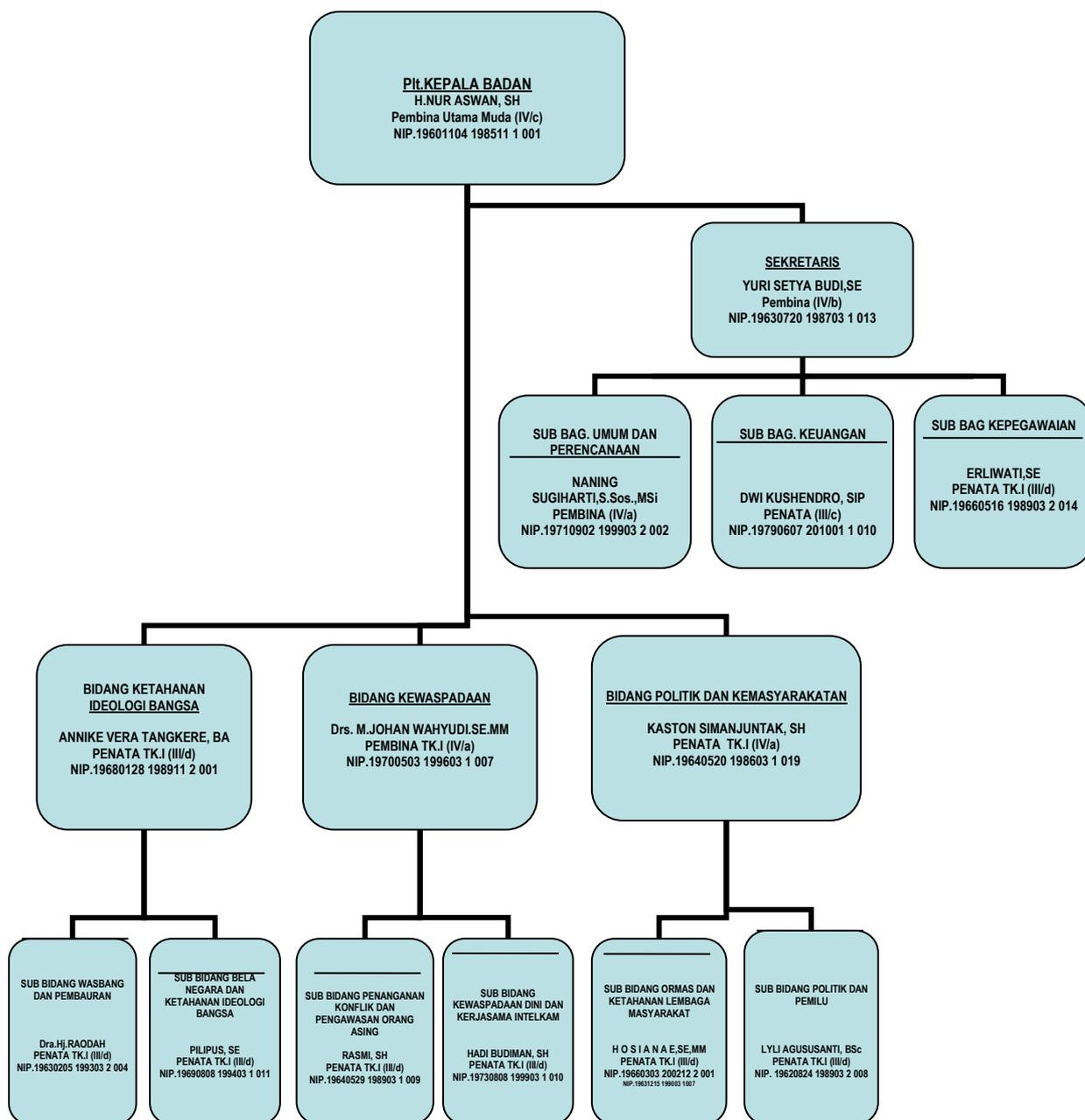


BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kondisi umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai Peraturan Daerah No.2 Tahun 2012 dapat digambarkan sebagai berikut :

Struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 10 September 2012

Dari struktur organisasi di atas dapat dilihat bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan yang merupakan pejabat Eselon II dan membawahi 1 (satu) Sekretariat, yang dipimpin Sekretaris Badan yang merupakan Pejabat Eselon III-a dan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang merupakan eselon IV-a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga membawahi 3 (tiga) bidang, masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang merupakan pejabat eselon III-b dan masing-masing Bidang membawahi 2 (dua) sub-bidang yang merupakan pejabat eselon IV-a. Jumlah pejabat fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 14 (empat belas) orang terdiri dari 1 (satu) orang pejabat eselon II-a (Kepala Badan), 1 (satu) orang pejabat eselon III-a (Sekretaris), 3 (tiga) orang eselon III-b (Kepala Bidang) dan 9 (sembilan) orang pejabat eselon IV-a (Kasubbid dan Kasubbag).

B. Tugas, Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 18 tahun 2008 Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur berubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan asas Otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 10 Desember 2012 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat mengalami perubahan menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan ketentuan pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Program dan kebijakan Kesatuan dan Persatuan Bangsa serta Politik

- b. Penerapan dan pelaksanaan pembinaan ketahanan Ideologi Bangsa serta pembinaannya;
- c. Pelaksanaan kebijakan kewaspadaan terhadap usaha-usaha yang mengganggu ketahanan, Ideologi dan Kesatuan Bangsa;
- d. Pelaksanaan dan Pembinaan Politik serta pembinaan Masyarakat;
- e. Pembinaan dan penerapan kebijakan upaya menjaga Kualitas Ideologi dan Kerukunan Umat Beragama;
- f. Pelaksanaan Ketatausahaan Badan; dan
- g. Pengoptimalisasi kinerja Badan mencapai Visi dan Misi Kabupaten Kotim

C. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SOPD

Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Kotawaringin Timur, sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

mempunyai tugas pokok yaitu “ membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Adapun fungsi dari pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik itu sendiri adalah : Perumusan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Pelaksanaan Kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Penyusunan Norma Standar, Prosedur dan Kriteria di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Pemberian Bimbingan Teknis dan Evaluasi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, serta pelaksanaan administrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pada Tahun 2018 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bila ditinjau dari tupoksinya di dukung dengan jumlah pegawai sebanyak 21 (dua satu) orang PNS dan 15 (lima belas) orang tenaga Honor/kontrak, terhitung 01 Maret 2018 1 (satu) orang PNS menjalani purna tugas atas nama NORMADIAH, Bc.Ak, Pangkat Penata Tk.II(III/d), jabatan Kasubbag Keuangan dan tanggal 01 Desember 2018 1 (satu) orang PNS atas nama Drs.KASPUL BAHRI, MT.M.AP, Pangkat Pembina Utama Muda (IV/c), jabatan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Permasalahan dan isu yang berkembang di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dijelaskan sebagai berikut :

➤ Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa

Permasalahan di bidang Ketahanan Ideologi Bangsa antara lain :

1. Ketahanan Ideologi Negara

- a. Menurunnya kebanggaan terhadap Pancasila sebagai dasar Negara dan ideologi nasional.
- b. Adanya kontroversi terhadap penyebutan Pancasila sebagai salah satu pilar, padahal Pancasila merupakan dasar / filosofi bangsa.
2. Wawasan Kebangsaan
 - a. Merosotnya rasa, paham dan semangat kebangsaan dikalangan masyarakat.
3. Bela Negara
 - a. Merosotnya rasa, paham dan semangat bela negara dikalangan masyarakat
4. Nilai-nilai sejarah kebangsaan
 - a. Terjadinya pergeseran nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat dikarenakan melupakan sejarah perjalanan perjuangan bangsa.
5. Pembauran dan Kewarganegaraan
 - a. Masalah isu-isu yang bernuansa SARA dan tindakan diskriminatif terhadap warganegara yang bertentangan dengan hak-hak sipil sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945.

➤ **Bidang Kewaspadaan**

Permasalahan di bidang Kewaspadaan antara lain :

1. Terjadinya konflik di berbagai daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur yang rawan akan memicu terjadinya konflik antar suku karena banyaknya warga pendatang dari berbagai daerah.
2. Terjadinya konflik di berbagai daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur, rawan memicu terjadinya konflik antara warga lokal dengan perusahaan perkebunan dan perusahaan pertambangan akibat adanya pembukaan lahan yang mencaplok dan merusak lahan warga dan tanah adat.
3. Masih tingginya tindak kriminalitas dilingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga.
4. Rendahnya kepekaan, kesiagaan dan antisipasi serta peran serta masyarakat dalam urusan keamanan dan ketentraman dan ketertiban.

➤ **Bidang Politik dan Kemasyarakatan**

1. Kurangnya pemahaman dan partisipasi politik masyarakat
2. Berkurangnya pemahaman masyarakat akan hak dan kewajiban dalam proses demokratisasi

3. Kerawanan dalam proses pilkada serentak

D. Landasan Hukum

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur adalah merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang setiap tahunnya wajib membuat dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

E. Dasar Hukum

1. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
6. Inpres RI Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara
7. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur No 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2000 Nomor. 23)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 18.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor.19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor.22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor. 188);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 2016–2021.

F. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2018 ini adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai Visi, Misi dan Tujuan Instansi Pemerintah, serta dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance).

Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2018 adalah untuk menggambarkan telah dilaksanakannya program kerja dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2018, sebagai penjabaran hasil program kerja setiap satuan kerja. Sehubungan dengan hal tersebut maka wajib bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2018.

G. Sistematika Penulisan

LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018 melaporkan pencapaian kinerja selama tahun 2018. Capaian kinerja diukur dan dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja (dulu Tapkin) 2018 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Tapkin sendiri merupakan penjabaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2018 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja sebagai masukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang. Laporan Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun dengan sistematika :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
BAB IV	P E N U T U P

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan yang dimaksud dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perencanaan strategis yang merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha mencapai tujuan atau rangkaian pengambilan keputusan berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun, yang secara sistematis dan berkesinambungan serta dengan memperhatikan dan mempertimbangkan lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan), serta lingkungan eksternal (peluang dan tantangan).

Perencanaan Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Rencana strategis mengandung visi dan misi, tujuan, sasaran yang realistis dan cara-cara mencapainya untuk mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan akan dicapai. Selanjutnya, **Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021** baru ditetapkan pada tanggal 24 November 2016, dan hal ini sesuai juga dengan surat Sekretaris Daerah nomor: 060/0100/ORG/I/2018, tanggal 15 Januari 2018, perihal Penyusunan LKIP SKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018, bahwa penyusunan LKIP dimaksud menggunakan data berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018, maka penyusunan LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur menggunakan Renstra Tahun 2016-2021.

Pada tanggal 9 Desember 2015 telah dilaksanakan Pemukada Bupati / Wakil Bupati Kotawaringin Timur periode masa jabatan 2016 -2021, dan telah dilantik secara definitif pada tanggal 17 Pebruari 2016 di Palangka Raya. Dalam periode masa jabatan 2016 – 2020 telah memasuki RPJMD tahap IV dan tahun 2017 memasuki tahun ke 2 (dua) RPJMD tahap IV. Pelaksanaan Pembangunan RPJMD sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Bupati terpilih periode 2016 – 2021, maka untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan Rencana Pembangunan Daerah perlu ditetapkan tema dan prioritas Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur dengan mengacu pada RPJPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005 – 2025 dan Prioritas Pemerintah Pusat.

Visi Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2016 – 2021 , Yaitu :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MADANI, DINAMIS, MANDIRI DAN BERDAYA SAING DALAM SUASANA RELIGIUS, KEBERSAMAAN, AMAN, SEJAHTERA.”

Dengan Motto :*(MANIS MANASAI)*

Yang diwujudkan melalui 4 butir Misi Kabupaten Kotawaringin Timur yang disampaikan Bupati dan Wakil Bupati periode 2016 – 2021, yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, terampil, sehat dan berakhlak.
2. Mengembangkan penguatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemantapan ketahanan pangan, pengembangan produk unggulan daerah dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

2

4. Mengembangkan daya saing daerah melalui usaha perdagangan dan jasa, industri pengolahan serta pariwisata dan budaya

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan :

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Mewujudkan dan meningkatkan kinerja Aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Mewujudkan dan meningkatkan ketahanan ideologi Berbangsa dan Bernegara.
3. Mewujudkan dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat.
4. Mewujudkan pemahaman pendewasaan tentang sikap dan perilaku yang demokratis dan saling menghargai dalam berpolitik dan berorganisasi pada masyarakat yang dilandasi oleh mantapnya pemahaman dan pengamalan Etika, moral dan Ideologi Berbangsa dan Bernegara.

Sasaran :

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu suatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Tujuan diatas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk sasaran dalam satu tahun yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.
2. Meningkatnya ketahanan ideologi berbangsa dan bernegara
3. Meningkatnya kewaspadaan masyarakat
4. Pendewasaan sikap dan perilaku yang tertib, demokrasi dan saling menghargai dalam berpolitik.

C. Rencana Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam renstra yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan Visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur, maka ditetapkan program dan kegiatan tahun 2017 sebagai berikut :

Bidang Sekretariat

Sasaran Strategis : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	
Indikator Kinerja	Target
Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	100%
- Jumlah administrasi keuangan yang selesai tepat waktu	
- Jumlah rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	64 OK
- Jumlah rapat koordinasi/konsultasi ke dalam daerah yang dihadiri	114 OK
Jumlah aparatur yang meningkat kapasitasnya	7 orang
- Jumlah aparatur yang mengikuti kursus singkat/pelatihan formal	7 orang
Jumlah/cakupan laporan yg valid	100%
- Jumlah laporan yang disusun	150 buah/buku
Cakupan kegiatan promosi yang diikuti	1 kali kegiatan
- Jumlah kegiatan promosi yang diikuti	1 kali kegiatan

Sasaran Strategis : Meningkatnya Pelayanan Publik	
Indikator Kinerja	Target
- Jumlah surat yang dilayani per tahun	1000 surat
- Jumlah bidang yang dilayani per tahun	4 bidang
- Luas kantor yang dilayani jasa kebersihan	7 jenis
- Jumlah bidang yang terpenuhi kebutuhan alat tulis kantor	4 bidang
- Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 jenis
- Jumlah komponen listrik yang disediakan	7 jenis
- Jumlah bahan bacaan dan per-UU yang disediakan	3 jenis
- Penyediaan makanan dan minuman	8928 OM

Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%
- Luasnya /Ukuran bangunan	250 m ²
- Jumlah kendaraan yang dibeli	2 unit
- Jumlah peralatan yg dibeli	-
- Jumlah mebeleur yang dibeli	50 buah
- Luasnya /Ukuran bangunan yg dirawat	1200 m ²
- Jumlah kendaraan dinas/ operasional yg dirawat	3 unit
- Jumlah perlengkapan gedung yg dirawat	14 kali
- Jumlah peralatan gedung yg dirawat	30 kali
Jumlah pelanggaran disiplin aparatur	
- Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	35 orang
- Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan	35 orang

Sasaran Strategis :	
Meningkatkan Tindak Lanjut Hasil Temuan	
Indikator Kinerja	Target
- Menurunnya jumlah hasil temuan pemeriksaan dari Inspektorat	1 dokumen

Bidang Ketahanan dan Ideologi Bangsa

Sasaran Strategis : Meningkatnya Ketahanan Ideologi Berbangsa dan Bernegara	
Indikator Kinerja	Target
- Persentase penurunan jumlah konflik berlatang belakang agama	%
- Jumlah peserta FKUB dan jumlah Rapat koordinasi Dewan Penasehat FKUB	50 orang/1kali
- Jumlah peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan, Forum Pembauran Kebangsaan ,Ikrar Bersama Anak Bangsa, Forum Bela Negara, Pembentukan Forum Bela Negara di Kecamatan	100 orang

Bidang Politik dan Kemasyarakatan

Sasaran Strategis : Pendewasan sikap dan perilaku yang tertib, demokratis, dan saling menghargai dalam berpolitik	
Indikator Kinerja	Target
- Jumlah peserta penyuluhan	180 orang
- Jumlah parpol yang terdaftar	12 parpol
- Jumlah parpol dan ormas yang didata/dipantau	12 parpol / 58 ormas

Bidang Kewaspadaan

Sasaran Strategis : Meningkatnya Kewaspadaan Masyarakat	
Indikator Kinerja	Target
- Persentase penurunan jumlah konflik sosial masyarakat	%
- Persentase FKDM yang terbentuk tingkat kecamatan	100%
- Jumlah rapat Kominda dan pelaksanaan FKDM, Rakor FKDM, Pembentukan FKDM di Kecamatan	4 kali/50 orang
- Jumlah wilayah yang menjadi obyek pengawasan	
- Jumlah Rencana Aksi Daerah yang dilaksanakan	2 kecamatan
- Jumlah desa/kecamatan yang dipetakan	5 aksi
- Jumlah desa/kecamatan yang dipantau	-
	-

Indikator keberhasilan yang ingin dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

- Jumlah administrasi keuangan yang selesai tepat waktu
- Jumlah rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah yang dihadiri
- Jumlah rapat koordinasi/konsultasi ke dalam daerah yang dihadiri
- Jumlah aparatur yang mengikuti kursus singkat/pelatihan formal
- Jumlah laporan yang disusun
- Jumlah kegiatan promosi yang diikuti

2. Meningkatkan Pelayanan Publik

- Jumlah surat yang dilayani per tahun
- Jumlah bidang yang dilayani per tahun
- Jumlah administrasi keuangan yang selesai tepat waktu
- Luas kantor yang dilayani jasa kebersihan
- Jumlah bidang yang terpenuhi kebutuhan alat tulis kantor
- Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
- Jumlah komponen yang disediakan
- Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan
- Jumlah penyediaan makanan dan minuman per tahun
- Luasnya/Ukuran Bangunan
- Jumlah peralatan yang dibeli
- Jumlah mebeleur yang dibeli
- Luasnya/Ukuran bangunan yang dirawat
- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat
- Jumlah perlengkapan gedung yang dirawat
- Jumlah peralatan gedung yang dirawat
- Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan yang disediakan

3. Meningkatkan Tindak Lanjut Hasil Temuan

4. Meningkatkan ketahanan Ideologi Berbangsa dan Bernegara

- Persentase penurunan jumlah konflik berlatar belakang agama
- Jumlah peserta FKUB dan jumlah Rapat koordinasi Dewan Penasehat FKUB

- Jumlah peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan, Forum Pembauran Kebangsaan, Ikrar Bersama Anak Bangsa, Forum Bela Negara, Pembentukan Forum Bela Negara di Kecamatan

5. Meningkatnya kewaspadaan masyarakat

- Persentase penurunan jumlah konflik sosial masyarakat
- Persentase FKDM yang terbentuk tingkat kecamatan
- Jumlah rapat Kominda dan pelaksanaan FKDM, Rakor FKDM, Pembentukan FKDM di Kecamatan
- Jumlah wilayah yang menjadi obyek pengawasan
- Jumlah Rencana Aksi Daerah yang dilaksanakan
- Jumlah desa/kecamatan yang dipetakan
- Jumlah desa/kecamatan yang dipantau

6. Pendewasaan sikap dan perilaku yang tertib, demokratis dan saling menghargai dalam berpolitik :

- Jumlah peserta penyuluhan
- Jumlah parpol yang terdaftar
- Jumlah parpol dan ormas yang didata/dipantau

D. Penetapan Kinerja / Perjanjian Kinerja

Dengan telah diterbitkannya Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, kemudian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara segera menindaklanjuti dengan diterbitkannya surat Edaran Menteri Negara PAN No.SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Dengan diterbitkannya Permenpan dan RB Nomor .53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka surat Edaran Menteri Negara PAN No.SE/31/M.PAN/12 /2004 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Penetapan Kinerja atau Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja / perjanjian kinerja antara lain adalah : untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

Penetapan Kinerja / Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1: Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas Kinerja

Indikator Kinerja, Target Program/Kegiatan anggaran digambarkan sebagai berikut :

1. Bidang Sekretariat

1. Sasaran Strategis : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	
Indikator Kinerja	Target
Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	100%
- Jumlah administrasi keuangan yang selesai tepat waktu	

- Jumlah rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	64 OK
- Jumlah rapat koordinasi/konsultasi ke dalam daerah yang dihadiri	114 OK
Jumlah aparatur yang meningkat kapasitasnya	7 orang
- Pendidikan dan Pelatihan Formal	7 orang
Jumlah/cakupan laporan yang valid	100%
- Jumlah laporan yang disusun	150 buah/buku
Cakupan kegiatan promosi yang diikuti	1 kali kegiatan
- Jumlah kegiatan promosi yang diikuti	1 kali kegiatan

Adapun anggaran yang tersedia untuk pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

	Program / Kegiatan	APBD 2017
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	917.507.380
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	317.507.380
	Rapat rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	400.000.000
	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	200.000.000
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	38.500.000
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	38.500.000
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7.500.000
	Penyusunan RKA/DPA SKPD	7.500.000
4	Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	30.000.000
	Pelaksanaan Sampit EXPO	30.000.000

2. Sasaran Strategis :	
Meningkatnya Pelayanan Publik	
Indikator Kinerja	Target
Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	100%
- Jumlah surat yang dilayani per tahun	1000 surat
- Jumlah bidang yang dilayani per tahun	4 bidang
- Luas kantor yang dilayani jasa kebersihan	7 jenis
- Jumlah bidang yang terpenuhi kebutuhan alat tulis kantor	4 bidang
- Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 jenis
- Jumlah komponen listrik yang disediakan	7 jenis
- Jumlah bahan bacaan dan per-UU yang disediakan	3 jenis
- Penyediaan makanan dan minuman	8928 OM
Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%
- Luasnya /Ukuran bangunan	250 m ²
- Jumlah kendaraan yang dibeli	2 unit
- Jumlah peralatan yg dibeli	-
- Jumlah mebeleur yang dibeli	50 buah
- Luasnya /Ukuran bangunan yg dirawat	1200 m ²
- Jumlah kendaraan dinas/ operasional yg dirawat	3 unit
- Jumlah perlengkapan gedung yg dirawat	14 kali

- Jumlah peralatan gedung yg dirawat	30 kali
Jumlah pelanggaran disiplin aparatur	
- Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	35 orang

Adapun anggaran yang tersedia untuk pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

	Program / Kegiatan	APBD 2017
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	705.125.803
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.800.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	77.032.449
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	317.507.380
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	112.314.907
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	47.975.379
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.188.688
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	6.059.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	24.480.000
	Penyediaan makanan dan minuman	69.768.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	434.040.463
	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	15.000.000
	Pengadaan Mebeleur	46.315.000
	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	169.985.000
	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	159.715.440
	Pemeliharaan Rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor	6.550.000
	Pemeliharaan Rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor	36.475.023
3.	Program Peningkatan disiplin Aparatur	25.631.000
	Pengadaan Pakaian Dinas dan perlengkapannya	25.631.000

3. Sasaran Strategis : Meningkatkan Tindak Lanjut Hasil Temuan	
Indikator Kinerja	Target
- Menurunnya jumlah hasil temuan pemeriksaan dari Inspektorat	1 dokumen

4. Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa

Sasaran Strategis : Meningkatnya Ketahanan Ideologi Berbangsa dan Bernegara	
Indikator Kinerja	Target

- Persentase penurunan jumlah konflik berlatar belakang agama	%
- Jumlah peserta FKUB dan jumlah Rapat koordinasi Dewan Penasehat FKUB	50 orang / 1 kali
- Jumlah peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan, Forum Pembauran Kebangsaan ,Ikrar Bersama Anak Bangsa, Forum Bela Negara, Pembentukan Forum Bela Negara di Kecamatan	100 orang

Adapun anggaran yang tersedia untuk pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

	Program / Kegiatan	APBD 2017
1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	46.651.500
	Forum Kerukunan Umat Beragama	30.040.000
	Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama	16.611.500
2	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	302.308.734
	Forum Pembauran Kebangsaan	38.268.013
	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	38.268.000
	Forum Bela Negara	49.965.000
	Ikrar Bersama Anak Bangsa	76.940.000
	Sosialisasi Perda No.5 Tahun 2004 Tentang Etnis	98.867.721

5. Bidang Kewaspadaan

Sasaran Strategis : Meningkatnya Kewaspadaan Masyarakat		
	Indikator Kinerja	Target
	- Persentase penurunan jumlah konflik sosial masyarakat	100%
	- Persentase FKDM yang terbentuk tingkat kecamatan Se Kabupaten Kotawaringin Timur	100%
	- Jumlah rapat Kominda dan pelaksanaan FKDM, Rakor FKDM, Pembentukan FKDM di Kecamatan	4 kali / 50 orang
	- Jumlah wilayah yang menjadi obyek pengawasan	2 kecamatan
	- Jumlah Rencana Aksi Daerah yang dilaksanakan	5 aksi
	- Jumlah desa/kecamatan yang dipetakan	-
	- Jumlah desa/kecamatan yang dipantau	-
	Program / Kegiatan	APBD 2017
1.	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	619.508.500

- Pembinaan Peningkatan Wawasan Kebangsaan	437.2888.000
- Pengawasan Orang Asing	56.468.000
- Pemetaan Daerah Rawan Konflik	46.068.750
- Pemantauan Konflik Sosial	40.893.750
- Penyusunan Rencana Aksi Daerah	38.790.000

6. Bidang Politik dan Kemasyarakatan

Sasaran Strategis :	
Pendewasan sikap dan perilaku yang, tertib, demokratis dan saling menghargai dalam berpolitik.	
Indikator Kinerja	Target
- Jumlah peserta penyuluhan	180 orang
- Jumlah parpol yang terdaftar	12 parpol
- Jumlah parpol dan ormas yang didata/dipantau	12 parpol / 58 ormas
Program / kegiatan	APBD 2017
1 Program Pendidikan Politik Masyarakat	153.316.000,-
- Penyuluhan kepada masyarakat	113.656.000,-
- Penyusunan data base partai politik	32.040.000,-
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan	7.620.000,-

Penetapan Kinerja / Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dapat dilihat pada **Lampiran 3.**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi pada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberian amanah.

Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239 /IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan, baik keberhasilan –keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2017. Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya Badan Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Kotawaringin Timur menetapkan katagorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi 4 (empat) katagori berikut :

>100 %	: Sangat Berhasil
91% - 100 %	: Berhasil
81% - 90 %	: Cukup Berhasil
<81%	: Kurang Berhasil

REKAPITULASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	
1	Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	100	91,86	91,86
	- Jumlah administrasi keuangan yang selesai tepat waktu	100	91,25	91,25
	- Jumlah rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100	100	100
	- Jumlah rapat koordinasi/konsultasi ke dalam daerah yang dihadiri	100	99,18	99,18
2	Jumlah aparatur yang meningkat kapasitasnya	100	100	100
	- Jumlah aparatur yang mengikuti kursus singkat/pelatihan formal	100	100	100
3	Jumlah/cakupan laporan yg valid	100	100	100
	- Jumlah laporan yang disusun	100	100	100
4	Cakupan kegiatan promosi yang diikuti	100	100	100
	- Jumlah kegiatan promosi yang diikuti	100	100	100
5	Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	100	93,97	93,97
	- Jumlah surat yang dilayani per tahun	100	100	100
	- Jumlah bidang yang dilayani per tahun	100	71,09	71,09
	- Luas kantor yang dilayani jasa kebersihan	100	71,18	71,18
	- Jumlah bidang yang terpenuhi kebutuhan alat tulis kantor	100	98,60	98,60
	- Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100	99,92	99,92
	- Jumlah komponen listrik yang disediakan	100	99,50	99,50
	- Jumlah bahan bacaan dan per- UU yang disediakan	100	100	100
	- Penyediaan makanan dan minuman	100	91,43	91,43
6	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100	97,90	97,90

	- Luasnya /Ukuran bangunan	100	99,47	99,47-
	- Jumlah peralatan yg dibeli	100	95,65	95,65
	- Jumlah mebeleur yang dibeli	100	100	100
	- Luasnya /Ukuran bangunan yg dirawat	100	97,98	97,98
	- Jumlah kendaraan dinas/ operasional yg dirawat	100	95,00	95,00
	- Jumlah perlengkapan gedung yg dirawat	100	100	100
	- Jumlah peralatan gedung yg dirawat	100	99,18	99,18
7	Jumlah pelanggaran disiplin aparatur	100	100	100
	- Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	100	100	100
8	Cakupan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	100	66,66	66,66
	- Persentase penurunan jumlah konflik berlatang belakang agama	100	0	0
	- Jumlah peserta FKUB dan jumlah Rapat koordinasi Dewan Penasehat FKUB	100	100	100
	- Jumlah peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan, Forum Pembauran Kebangsaan ,Ikrar Bersama Anak Bangsa, Forum BelaNegara, Pembentukan Forum Bela Negara di Kecamatan	100	100	100
9	Cakupan Wilayah Pengembangan Wawasan Kebangsaan	100	83,88	83,88
	- Persentase penurunan jumlah konflik sosial masyarakat	100	0	0
	- Persentase FKDM yang terbentuk tingkat kecamatan	100	100	100
	- Jumlah rapat Kominda dan pelaksanaanFKDM, Rakor FKDM, Pembentukan FKDM di Kecamatan	100	97,76	97,76
	- Jumlah wilayah yang menjadi obyek pengawasan	100	98,99	98,99
	- Jumlah Rencana Aksi Daerah yang dilaksanakan	100	97,90	97,90
	- Jumlah desa/kecamatan yang dipetakan	100	97,26	97,26
	- Jumlah desa/kecamatan yang dipantau	100	95,31	95,31
10	Cakupan parpol/ormas yang	100	75	75

	mendapatkan pendidikan politik			
	- Jumlah peserta penyuluhan	100	100	100
	- Jumlah parpol yang terdaftar	100	100	100
	- Jumlah parpol dan ormas/LSM yang didata/dipantau	100	100	100
	- Dewan Adat Dayak			
Jumlah Nilai Capaian :				909,27
Capaian Rata-rata Kinerja :				90,92

Total nilai capaian kinerja adalah 909,27 atau dengan nilai rata-rata 90,92% masuk dalam katagori penilaian Berhasil

Capaian Kinerja Organisasi

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran, pencapaian kinerja program/kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari output, outcome.

Media pengukuran kinerja berupa Formulir PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan). Dapat dilihat pada *lampiran 4*

Untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja sasaran Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur.

Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Kotawaringin Timur dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran I . Bidang Sekretariat

Sasaran Strategis :
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran Kinerja :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
-------------------	--------	-----------	---------

Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	100	96,81	96,81
- Jumlah administrasi keuangan yang selesai tepat waktu	100	91,25	91,25
- Jumlah rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100	100	100
- Jumlah rapat koordinasi/konsultasi ke dalam daerah yang dihadiri	100	99,18	99,18
Jumlah aparatur yg meningkat kapasitasnya	100	100	100
- Jumlah aparatur yang mengikuti kursus singkat/pelatihan formal	100	100	100
Jumlah/cakupan laporan yg valid	100	100	100
- Jumlah laporan yang disusun	100	100	100
Cakupan kegiatan promosi yang diikuti	100	100	100
- Jumlah kegiatan promosi yang diikuti	100	100	100
Capaian Sasaran			99,20 %

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran” Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja” adalah sebesar 99,20% berarti masuk dalam kategori capaian “ Berhasil”.

Program / kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Pendidikan dan Pelatihan Formal

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan RKA/DPA SKPD

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

- Pelaksanaan Sampit Expo

Keterangan :

Pada tahun 2016, berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran :“Meningkatnya Kinerja Aparatur Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat” sebesar 97%. Program yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah : “Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur”, karena ketersediaan dana yang memadai sehingga dapat mengikutsertakan 10 orang dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal baik dalam masalah keuangan, aparatur maupun pelatihan teknis lainnya.

Pada tahun 2017, berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran : “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja” sebesar 99,20%. Ada 4 Program yang mendukung tercapainya sasaran tersebut yaitu : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. Pada setiap program capaian kinerja hampir mencapai 100%.

2. Sasaran Strategis :
Meningkatnya Pelayanan Publik

Pengukuran Kinerja :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	100	100	93,97
- Jumlah surat yang dilayani per tahun	100	100	100
- Jumlah bidang yang dilayani per tahun	100	71,09	71,09
- Luas kantor yang dilayani jasa kebersihan	100	91,25	91,25
- Jumlah bidang yang terpenuhi kebutuhan alat tulis kantor	100	98,60	98,60
- Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100	99,92	99,92
- Jumlah komponen listrik yang disediakan	100	99,50	99,50
- Jumlah bahan bacaan dan per-UU yang disediakan	100	100	100
- Penyediaan makanan dan minuman	100	91,43	91,43
Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100	97,90	97,90
- Luasnya /Ukuran bangunan	100	99,47	99,47-
- Jumlah peralatan yg dibeli	100	95,65	95,65
- Jumlah mebeleur yang dibeli	100	100	100
- Luasnya /Ukuran bangunan yg dirawat	100	95,00	95,00
- Jumlah kendaraan dinas/ operasional yg dirawat	100	100	100
- Jumlah perlengkapan gedung yg dirawat	100	100	100
- Jumlah peralatan gedung yg dirawat	100	99,18	99,18
Jumlah pelanggaran disiplin aparatur	100	100	100
- Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	100	100	100
Capaian Sasaran			97,29 %

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran” Meningkatkan Pelayanan Publik” adalah sebesar 97,29 % berarti masuk dalam kategori capaian “ Berhasil”.

Program / kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pembangunan Gedung Kantor
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- Pengadaan Mebeleur
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Keterangan :

Pada tahun 2017, berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran : “Meningkatnya Pelayanan Publik” sebesar 97,29%. Ada 3 Program yang mendukung tercapainya sasaran tersebut yaitu : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Pada setiap program capaian kinerja hampir mencapai lebih dari 90%, kecuali pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik hanya mencapai 71,09% hal ini dikarenakan belanja pada kegiatan tersebut kurang maksimal penyerapannya sehingga ada pagu anggaran yang tersisa.

Keterangan :

- Pada tahun 2016, Audit hasil pemeriksaan Inspektorat Kab.Kotim TA.2016 terkait dengan pertanggungjawaban Anggaran Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung serta asset pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Kotim tidak ada temuan.
- Pada tahun 2017, Audit hasil pemeriksaan Inspektorat Kab.Kotim TA.2017 mengenai Pertanggungjawaban atas Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung tidak ada temuan (untuk Keuangan) sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan pengelolaan keuangan.
- Untuk Naskah Hasil Pemeriksaan Aset TA.2017 yaitu sebagai berikut
 - : Pencatatan asset pada KIB tidak normatif
 - Terdapat pengadaan barang/pekerjaan TA.2017 belum tercatat pada KIB
 - Terdapat barang extra komptable masih tercatat pada KIB tahun 2017

Berdasarkan hasil pemeriksaan terkait masalah asset, data-data yang terkait dengan perihal tersebut di atas telah dipenuhi sebagaimana mestinya dan berdasarkan hasil konsultasi dengan pihak Inspektorat bahwa tanggapan hasil audit tidak boleh dicantumkan secara terbuka karena bersifat rahasia.

4. Sasaran Strategis : Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa

<p>Sasaran Strategis :</p> <p>Meningkatnya Ketahanan Ideologi Berbangsa dan Bernegara</p>
--

Pengukuran Kinerja :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1. Persentase penurunan jumlah konflik berlatar belakang agama	100%	-	-
2. Jumlah peserta FKUB dan jumlah Rapat Dewan Penasehat FKUB	50 orang/1 kali	100	100
3. Jumlah peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan, Forum Pembauran Kebangsaan, Ikrar Bersama Anak Bangsa, Forum Bela Negara, Pembentukan Forum Bela Negara di Kecamatan	100 orang	100	100
Capaian Sasaran			99,93 %

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “ Meningkatkan Ketahanan Ideologi Berbangsa dan Bernegara adalah sebesar “99,93 %” yang masuk dalam kategori capaian “ Berhasil “.

Program / Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah :

- Program Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama Forum Kerukunan Umat Beragama
Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama
- Program Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan

Forum Pembauran Kebangsaan

Ikrar Bersama Anak Bangsa

Forum Bela Negara

Sosialisasi Perda no.05 tentang Etnis

Keterangan :

- Pada Tahun 2016 pada saat tahun berjalan kegiatan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragamamengalami pemangkasan dana sehingga kegiatan rapat tersebut tidak dapat dilaksanakan.
- Pada Tahun 2017, semua kegiatan pada Program Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama dan Program Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa capaiannya sebesar 100% dan pada APBD-P TA.2017 tidak mengalami penambahan ataupun pengurangan.

5. Sasaran : Bidang Kewaspadaan

Sasaran Strategis :

Meningkatnya kewaspadaan masyarakat

Pengukuran Kinerja:

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1. Persentase penurunan jumlah konflik sosial masyarakat	100%	0%	0%
2. Persentase FKDM yang terbentuk tingkat kecamatan			
3. JumlahrapatKomindadan pelaksanaan FKDM, Rakor FKDM, Pembentukan FKDM di Kecamatan	100 %	100 %	100 %
4. Jumlah wilayah yang menjadi obyek pengawasan			
5. Jumlah Rencana Aksi Daerah yang dilaksanakan	100	97,76	97,76
6. Jumlah desa/kecamatan yang dipetakan			
7. Jumlah desa/kecamatan yang dipantau			

	100	98,99	98,99
	100 %	97,90	97,90
	100 %	97,26	97,26
	100%	95,31	95,31
Capaian Sasaran			97,44 %

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “Meningkatnya Kewaspadaan Masyarakat “ adalah 97,44 % yang berarti masuk dalam kategori capaian”Berhasil”.

Program / kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah :

- Program Pengembangan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - a. Pembinaan Peningkatan Wawasan Kebangsaan
 - b. Pengawasan Orang Asing
 - c. Pemetaan Daerah Rawan Konflik
 - d. Pemantauan Konflik Sosial
 - e. Penyusunan Rencana Aksi Daerah

Keterangan :

Pada Tahun 2016 pencapaian sasaran mengalami peningkatan hingga mencapai 100% dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena penyediaan dana yang memadai sehingga dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.

Pada Tahun 2017, pencapaian sasaran untuk semua kegiatan yang dilaksanakan hampir di atas 90%. Pada APBD-P 2017 ada beberapa kegiatan yang mengalami penambahan anggaran yaitu pada Kegiatan Pembinaan Peningkatan Wawasan Kebangsaan, Pengawasan Orang Asing dan Pemantauan Konflik Sosial.

8. Sasaran : Bidang Politik dan Kemasyarakatan

Sasaran Strategis :

Pendewasan sikap dan perilaku yang tertib , demokratis dan saling menghargai dalam berpolitik

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
-------------------	------------	---------------	-------------

1. Jumlah peserta penyuluhan	100	100	100
2. Jumlah parpol yang terdaftar	100	100	100
3. Jumlah parpol dan ormas yang didata/dipantau	100	100	100
4. Dewan Adat Dayak (DAD)	100	-	-
Capaian Sasaran			75 %

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “Pendewasaan Sikap dan perilaku yang tertib, demokrasi dan saling menghargai dalam berpolitik” adalah sebesar 75 % yang berarti masuk dalam kategori capaian “Kurang Berhasil”.

Program / kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah :

- Program Pendidikan Politik Masyarakat :
 - a. Penyuluhan Kepada Masyarakat (Pembinaan Partai Politik, Forum Komunikasi Ormas/LSM, Sosialisasi terkait Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019)
 - b. Penyusunan Database Partai Politik (Akurasi Data dan Pemantauan Kegiatan Partai Politik, Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik)
 - c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Akurasi Data Ormas dan LSM)
 - d. Dewan Adat Dayak (DAD)

Keterangan :

Pelaksanaan 3 kegiatan dari 4 kegiatan tersebut di atas telah mencapai 100% , sesuai dengan target yang direncanakan. Hanya pada kegiatan Dewan Adat Dayak (DAD) yang anggarannya ada pada APBD-P 2017 tidak dapat dilakukan pencairan anggaran karena SK Kepengurusan Dewan Adat Dayak yang belum definitive sehingga capaian pada Program Pendidikan Politik Masyarakat hanya sebesar “75%”.

B. Realisasi Anggaran

Guna melaksanakan seluruh Program dan Kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017

menganggarkan jumlah Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 2.668.125.000; dan Belanja Langsung sebesar Rp 4.312.582.000;

Data anggaran dan realisasi DPPA Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Kotawaringin Timur untuk tahun 2017 tersaji sebagaiberikut :

NO	Program/Kegiatan	APBD 2017	APBD-P 2017	Realisasi	%
	Belanja Tidak Langsung	2.524.904.250	2.668.125.000	2.463.692.485	94.08
	Belanja Langsung	2.962.582.000	4.312.582.000	3.961.554.506	91.86
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.305.125.803	1.770.557.807	1.686.580.918	95.26
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.800.000	9.300.000	9.300.000	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	77.032.449	54.000.000	38.389.608	71.09
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	317.507.380	290.357.100	264.959.353	91.25
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	112.314.907	112.756.767	80.261.257	71.18
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	47.975.379	57.974.479	57.164.950	98.60
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.188.688	43.154.961	43.122.250	99.92
	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.059.000	7.059.000	7.024.000	99.50
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.480.000	26.480.000	26.480.000	100
	Penyediaan Makanan & Minuman	69.768.000	80.008.000	73.150.000	91.43
	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Luar Daerah	400.000.000	755.547.500	755.547.500	100
	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Dalam Daerah	200.000.000	333.920.000	331.182.000	99.18
2.	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	434.040.463	720.530.459	705.392.440	97.90
	Pembangunan Gedung Kantor		320.000.000	318.296.000	99.47
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	15.000.000	42.950.000	37.930.000	95.65
	Pengadaan Mebeleur	46.315.000	46.315.000	46.090.000	100
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	169.985.000	75.985.000	74.450.000	97.98
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	159.715.440	190.255.436	180.751.140	95
	Pemeliharaan rutin/berkala	6.550.000	8.550.000	8.550.000	100

	perlengkapan gedung kantor				
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	36.475.023	36.475.023	36.175.300	99.18
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	25.531.000	25.631.000	21.180.000	100
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	25.631.000	25.631.000	21.180.000	100
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	38.500.000	66.000.000	64.500.000	100
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	38.500.000	66.000.000	64.500.000	100
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7.500.000	15.000.000	15.000.000	100
	Penyusunan RKA/DPA SKPD	7.500.000	15.000.000	15.000.000	100
6.	Program Peningkatan Promosi & Investasi Daerah	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100
	Pelaksanaan Sampit EXPO	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100
7.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	348.960.234	348.960.234	348.730.000	99.93
	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	46.651.500	46.651.500	46.651.500	100
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	302.308.734	302.308.734	302.078.500	100
8.	Program Kemitraan Wawasan Kebangsaan	619.508.500	943.736.000	923.004.648	97.80
	Pembinaan Peningkatan Wawasan Kebangsaan	437.288.000	677.605.500	662.454.148	97.76
	Pengawasan Orang Asing	56.468.000	81.288.000	80.468.000	98.99
	Pemetaan Daerah Rawan Konflik	46.068.750	46.068.750	44.808.750	97.26
	Pemantauan Konflik Sosial	40.893.750	99.983.750	97.743.750	95.31
	Penyusunan Rencana Aksi Daerah	38.790.000	38.790.000	37.530.000	97.90
9.	Program Pendidikan Politik Masyarakat	153.316.000	392.166.500	167.166.500	42.63
	Penyuluhan Kepada Masyarakat	113.656.000	127.506.500	127.506.500	100
	Penyusunan Database Partai Politik	32.040.000	32.040.000	32.040.000	100
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	7.620.000	7.620.000	7.620.000	100
	Dewan Adat Dayak (DAD)		225.000.000		-
	Capaian Kinerja Keuangan				92.04

Dari data diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya

sebesar Rp 6.980.707.00,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 6.425.246.991,- atau capaian kinerja keuangan 92,04 %.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur telah melaksanakan 09 program dan 33 kegiatan, namun dalam APBD perubahan ada penambahan 1 kegiatan yaitu kegiatan Dewan Adat Dayak (DAD) pada Program Pendidikan Politik Masyarakat, sehingga menjadi 33 kegiatan dari 09 program. Dari seluruh kegiatan tersebut merupakan indikator sasaran dalam mencapai 2 (dua) sasaran strategis atau dengan kata lain kegiatan yang diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan sasaran yang ditetapkan dan analisis capaian kinerja keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut :

1. Keberhasilan pencapaian kinerja keuangan sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja” diukur melalui 6 (enam) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi keuangan disajikan pada table 5.1 berikut :

Tabel 5.1

NO	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.379.624.600	1.351.688.853	96,81
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	290.357.100	264.959.353	91,25
	Rapat-rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah	755.547.500	755.547.500	100
	Rapat-rapat koordinasi/konsultasi ke dalam daerah	333.920.000	331.182.000	99,18
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	66.000.000	64.500.000	100
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	66.000.000	64.500.000	100
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	15.000.000	15.000.000	100
	Penyusunan RKA/DPA	15.000.000	15.000.000	100
4	Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	30.000.000	30.000.000	100
	Pelaksanaan Sampit EXPO	30.000.000	30.000.000	100
Capaian Kinerja Keuangan				99,20

2. Keberhasilan pencapaian kinerja keuangan sasaran “Meningkatnya Pelayanan Publik” diukur melalui 16 (enam belas) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi keuangan disajikan pada table 5.2 berikut :

Tabel 5.2

NO	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	390.733.207	334.892.065	91,46
	Penyediaan jasa surat menyurat	9.300.000	9.300.000	100
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	54.000.000	38.389.608	71,09
	Penyediaan jasa kebersihan	112.756.767	80.261.257	71,18
	Penyediaan alat tulis kantor	57.974.479	57.164.950	98,60
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	43.154.961	43.122.250	99,92
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.059.000	7.024.000	99,50
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	26.480.000	26.480.000	100
	Penyediaan makanan dan minuman	80.008.000	73.150.000	91,43
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	720.530.459	705.392.440	97,90
	Pembangunan gedung kantor	320.000.000	318.296.000	99,47
	Pengadaan peralatan gedung kantor	42.950.000	41.080.000	95,65
	Pengadaan mebeleur	46.315.000	46.090.000	100
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	75.985.000	74.450.000	97,98
	Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional	190.255.436	180.751.140	95
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	8.550.000	8.550.000	100
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	36.475.023	36.175.300	99,18
3	Program peningkatan disiplin aparatur	25.631.000	21.180.000	100
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	25.631.000	21.180.000	100
	Capaian Kinerja Keuangan			96,45

3. Keberhasilan pencapaian kinerja keuangan sasaran “Meningkatnya Ketahanan Ideologi Berbangsa dan Bernegara” diukur melalui 2(dua) indikator. Indikator kinerja sasaran berikut target dan realisasi keuangan disajikan pada table 5.3 berikut :

Tabel 5.3

NO	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	348.960.234	348.730.000	99,96
	Peningkatan Toleransi dan	46.651.500	46.651.500	100

	Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama			
	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	302.308.734	302.078.500	99,92
	Capaian Kinerja Keuangan			99,96

4. Keberhasilan pencapaian kinerja keuangan sasaran “Meningkatnya Kewaspadaan Masyarakat ” diukur melalui 5 (lima) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi keuangan disajikan pada table 5.4 berikut :

Tabel 5.4

NO	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	943.736.000	923.004.648	97,80
	Pembinaan Peningkatan Wawasan Kebangsaan	677.605.500	662.454.148	97,76
	Pengawasan Orang Asing	81.288.000	80.468.000	98,99
	Pemetaan Daerah Rawan Konflik	46.068.750	44.808.750	97,26
	Pemantauan Konflik Sosial	99.983.750	97.743.750	95,31
	Penyusunan Rencana Aksi Daerah	38.790.000	37.530.000	97,90
	Capaian Kinerja Keuangan			97,80

5. Keberhasilan pencapaian kinerja keuangan sasaran “Pendewasaan sikap dan perilaku yang tertib, demokratis dan saling menghargai dalam berpolitik ” diukur melalui 4 (empat) indikator. Indikator kinerja sasaran berikut target dan realisasi keuangan disajikan pada table 5.5 berikut :

Tabel 5.5

NO	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Pendidikan Politik Masyarakat	392.166.500	167.166.500	100
	Penyuluhan kepada masyarakat	127.506.500	127.506.500	100
	Penyusunan database partai politik	32.040.000	32.040.000	100
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	7.620.000	7.620.000	100
	Dewan Adat Dayak (DAD)	-	-	-
	Capaian Kinerja Keuangan			75

Dari total anggaran tersebut diatas, yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan 2 (dua) sasaran strategis adalah Rp 1.292.696.234 dan realisasi penyerapan pembiayaan sasaran sebesar Rp 1.271.734.648 atau 98,37% yang berarti masuk dalam katagori capaian “

Berhasil “. Dari 9 (sembilan) program diatas terdapat indikator sasaran dan realisasi capaian kinerja Keuangan dengan capaian berkisar antara 76% - 100 % meliputi :

- 1.** Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp 1.770.557.807 dan realisasi per 31 Desember 2017 sebesar Rp 1.686.580.918 (95,26%)
- 2.** Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp 720.530.459 dan realisasi per 31 Desember 2017 sebesar Rp 705.392.440 (97,90%)
- 3.** Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan anggaran sebesar Rp 25.631.000 dan realisasi per 31 Desember 2017 Rp 21.180.000 (82,63%)
- 4.** Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan anggaran sebesar Rp 66.000.000 dan realisasi per 31 Desember 2017 sebesar Rp 64.500.000 (97,72%)
- 5.** Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp 15.000.000 dan realisasi per 31 Desember 2017 sebesar Rp 15.000.000 (100%)
- 6.** Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan anggaran sebesar Rp 30.000.000 dan realisasi per 31 Desember 2017 sebesar Rp 30.000.000
- 7.** Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan anggaran sebesar Rp 348.960.234 dan realisasi per 31 Desember 2017 sebesar Rp 348.730.000
- 8.** Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan anggaran Rp 943.736.000 dan realisasi per 31 Desember 2017 sebesar Rp 923.004.648 (97,80)
- 9.** Program Pendidikan Politik Masyarakat dengan anggaran Rp 392.166.500 dan realisasi per 31 Desember 2017 sebesar Rp 167.166.500 (42,62%)

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

LKIP Tahun 2017 merupakan wujud pertanggungjawaban Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur kepada Bupati selaku pemberi amanah dan tugas.

Ada 09 (sembilan) program yang harus dipertanggungjawabkan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur melalui indikator kinerja *output* dan *outcome* yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja / Perjanjian Kinerja 2017. Dari hasil pencapaian kinerja kegiatan hampir keseluruhan di atas 90% dan pencapaian kinerja keuangan sebesar 92,04%. Dapat diambil kesimpulan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah berhasil melaksanakan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dari hasil pengukuran dan penilaian terhadap 10 indikator sasaran dari 2 (dua) sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai kinerja sangat memuaskan dengan capaian hampir 100% dari seluruh indikator kinerja kegiatan .
2. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dikelola di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur sudah sesuai dengan tugas pokok yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur dimana sumber daya yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin.

B.Strategi Peningkatan Kinerja

Dari hasil evaluasi kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur selama tahun 2017 dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan baik dengan ditunjang sarana prasarana yang cukup memadai, namun demikian masih terdapat beberapa hambatan dari internal dan eksternal antara lain :

- Dengan semakin tertibnya administrasi dan kemajuan teknologi, tetapi masih kurangnya SDM yang memenuhi kualitas yang diharapkan.

Adapun langkah-langkah untuk meminimalkan hambatan-hambatan yang ada adalah :

- Berupaya meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan mengikutsertakan pada diklat - diklat maupun pembinaan.

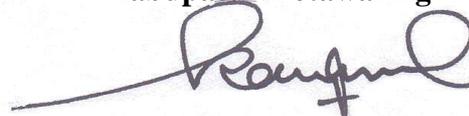
Oleh karena itu diperlukan Strategi Peningkatan Kinerja antara lain :

1. Kebijakan internal, yaitu kebijakan SKPD dalam upaya peningkatan tugas pokok dan fungsi yaitu :
 - a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
 - b. Peningkatan Pengawasan akuntabilitas
 - c. Penegakan aturan yang berlaku
2. Kebijakan eksternal yaitu kebijakan yang dilakukan oleh SKPD dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan yang ada kaitannya dengan mengundang masyarakat banyak yaitu :
 - a. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut berperan serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur.
 - b. Peningkatan koordinasi antar instansi sehubungan dengan adanya keterkaitan pelaksanaan kegiatan yang diadakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2017 ini disusun semoga bermanfaat bagi kita semua.

Sampit , Februari 2018

**Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kotawaringin Timur,**



Drs.H.KASPUL BAHRI,MT,M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP.19581128 198603 1 008

